

Analisis *Framing* Berita pada Akun Instagram @narasinewsroom Mengenai Isu Politik di Indonesia

Denaya Attala Aulyzan, Diryo Suparto, Inas Sany Muyassaroh

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia

*Correspondence Author: denayaattalaulyzan21@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the framing of political issue coverage on the Instagram account @narasinewsroom during the period of August–September 2025. The research employs a descriptive qualitative approach using Robert N. Entman framing analysis model, which consists of four main elements: problem definition, cause diagnosis, moral judgment, and treatment recommendation. Data were collected through documentation of visual content and textual narratives from 10 selected news posts based on the relevance of political issues, including public policy, law enforcement, human rights, and state power relations. The findings reveal that @narasinewsroom frames political issues as matters related to state power practices, political elite behavior, and public policy. The coverage highlights repressive law enforcement, alleged corruption, and ethical violations by public officials, with moral judgments that tend to be critical of power practices perceived as deviating from the principles of justice and democracy. The recommended solutions emphasize transparency, institutional accountability, and reform. The dominant issue framing focuses on repressive actions of state apparatus against civil society, reflected in the use of language that positions the public as affected parties. This indicates a framing tendency oriented toward society, making the coverage appear critical of the government. However, this tendency does not necessarily reflect media bias, but rather the result of the selection and salience of certain aspects of reality within the framing process. This study confirms that Instagram functions as a strategic arena for political meaning production, shaping public perceptions of power in the context of digital democracy.

Keywords: *Framing analysis; Instagram; political issues; social media.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembingkai pemberitaan mengenai isu politik di Indonesia pada akun Instagram @narasinewsroom selama periode Agustus–September 2025. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis *framing* model Robert N. Entman yang mencakup empat elemen utama, yaitu pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi terhadap konten visual dan narasi teks dari 10 unggahan berita yang dipilih berdasarkan relevansi isu politik, meliputi kebijakan publik, penegakan hukum, hak asasi manusia, dan relasi kekuasaan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun @narasinewsroom membingkai isu politik sebagai persoalan praktik kekuasaan negara, perilaku elite politik, dan kebijakan publik. Pemberitaan menyoroti penegakan hukum represif, dugaan korupsi, serta pelanggaran etika oleh pejabat publik, dengan penilaian moral yang cenderung kritis terhadap praktik kekuasaan yang dinilai menyimpang dari prinsip keadilan dan demokrasi. Rekomendasi yang ditampilkan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan reformasi kelembagaan. Penonjolan isu dominan terletak pada tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil, yang tercermin dari penggunaan diksi yang menempatkan masyarakat sebagai pihak terdampak. Hal ini menunjukkan kecenderungan framing yang berorientasi pada masyarakat, sehingga pemberitaan tampak kritis terhadap pemerintah. Namun, kecenderungan tersebut tidak semata-mata menunjukkan keberpihakan, melainkan merupakan hasil dari proses seleksi dan penonjolan realitas dalam framing. Penelitian ini menegaskan bahwa Instagram berperan sebagai arena produksi makna politik dalam membentuk persepsi publik di era demokrasi digital.

Kata Kunci: Analisis *framing*; Instagram; isu politik; media sosial

Pendahuluan

Kemajuan teknologi membawa banyak perubahan berbagai aspek kehidupan manusia khususnya dalam berkomunikasi dan dalam mendapatkan informasi. Perubahannya tidak hanya pada kehidupan masyarakat, melainkan pada praktik jurnalisme. Media digunakan sebagai sumber informasi yang seringkali dibutuhkan oleh jurnalis (Buchory & Sukmawati, 2022). Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet indonesia tahun 2025 mencapai 229.428.417 Jiwa dari total populasi 284.438.900 jiwa tahun 2025. Dari hasil survei pemakaian internet Indonesia tahun 2024 oleh APJII, pemakaian internet di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,16% dari periode sebelumnya dan saat ini menyentuh angka 80,66% (Survei Internet APJII 2025, 2025). Internet sebagai pondasi utama, media digital memungkinkan penyebaran informasi, konten, dan kampanye secara global dalam waktu instan (Permadi, Suparto, et al., 2024). Internet saat ini menjadi saluran politik, di mana orang-orang menggunakan untuk membaca dan mengekspresikan opini opini politik yang mereka terima (Heryanto, 2018).

Kehadiran media untuk menggali informasi saat ini semakin canggih.

Hadirnya media daring (*online*) menjadi sumber informasi yang dibutuhkan pembaca. Berita/informasi yang dibaca beragam sesuai dengan kebutuhan pembaca, mulai dari politik, sosial, budaya, agama, hukum, ekonomi, pendidikan, baik yang bersifat lokal maupun internasional. Media massa semakin menjamur, khususnya pada media pemberitaan daring. Media digital yang semakin baik perlahan membangun kesadaran para pembacanya (Yusyama & Khoirunnisa, 2021).

Tingkat kecerdasan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari bagaimana mereka menanggapi sajian pemberitaan-pemberitaan oleh media. Instagram termasuk dalam jajaran platform media sosial yang kini sedang naik daun, mengikuti jejak YouTube, WhatsApp, dan Facebook (Fujiawati & Raharja, 2021). Media sosial telah berkembang menjadi sarana komunikasi berbasis jaringan internet yang memudahkan individu untuk saling berinteraksi, salah satunya melalui penggunaan aplikasi media sosial seperti Instagram (Noventa et al., 2023). Instagram merupakan aplikasi yang menyediakan fitur bagi penggunanya untuk mengunggah serta membagikan foto maupun video melalui media sosial. Sisi lain, Instagram juga memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai sarana penyebaran informasi, media promosi, serta wadah untuk

mengekspresikan dan menyalurkan ide-ide kreatif melalui konten foto maupun video (Yohana & Valentina, n.d.).

Instagram sebagai platform berbasis gambar dan teks singkat semakin banyak digunakan oleh media untuk menyampaikan isu-isu aktual, termasuk isu mengenai politik yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Salah satu kanal Instagram yang menganalisis berita-berita terkini baik mengenai politik, sosial, ekonomi, hukum, sampai pendidikan, yaitu narasnewsroom (Yohana & Valentina, n.d.). PT. Narasi Media Percaya atau Narasi didirikan sejak tahun 2017 oleh Najwa Shihab, Catharina Davy dan Dahlia Citra. Narasnewsroom merupakan salah satu inisiatif yang dikembangkan oleh Narasi.tv. Mengacu pada situs resmi Narasi, platform ini berperan sebagai wadah kolaboratif untuk bertukar ide dan menyampaikan gagasan (Salsabila et al., 2023). Akun Instagram @narasnewsroom memiliki gaya penyajian berita yang unik dengan menggunakan gaya visual dan narasi yang khas, misalnya dengan pemilihan kata yang mudah dipahami audiens. Terlihat bahwa target audiens Narasi masyarakat yang mulai beralih dari televisi, sehingga kontennya dapat diakses melalui komputer, laptop, dan smartphone (Aziza, 2022).

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan sistem dan dasar penyelenggaraan pemerintahan serta

kekuasaan negara. Pada dasarnya, politik berfokus pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, dan umumnya mencakup aktivitas partai politik, keamanan, serta organisasi kemasyarakatan (Pureklolon, 2020). Dalam kajian ilmiah, isu politik dianalisis untuk memahami dinamika kekuasaan, proses pengambilan kebijakan, serta dampak keputusan politik terhadap masyarakat.

Media massa dijadikan ruang untuk perebutan kekuasaan. Media dipandang sebagai sarana ideal untuk menciptakan kekuatan dan mempengaruhi publik. Lebih tepatnya media dimanfaatkan sebagai sarana pembentukan kekuatan politik dan opini publik karena media tidak bersifat netral. Bagi elite politik, media dipandang sebagai tempat perebutan kekuasaan antar berbagai kekuatan sosial, dimana media terbentuk dari hasil pertarungan kepentingan tersebut (Zamroni, 2022).

Berdasarkan *Association for Education and Communication Technology* (AECT), media dimaknai sebagai suatu wadah atau instrumen yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar sebagai media dalam menyampaikan pesan atau informasi. Dalam proses penyampaian pesannya, arah media cetak dan elektronik di Indonesia bisa berupa pendidikan, pemberitahuan, pembujukan, atau rekreasi (Peranginangin et al., 2025). Pada platform digital seperti Instagram, pembentukan

makna terjadi melalui gabungan gambar dan teks pendek yang ringkas namun persuasif, sehingga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu yang disajikan.

Analisis *framing* merupakan bentuk pengembangan dari analisis wacana yang secara khusus diterapkan untuk mengkaji teks media agar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada khalayak (Mulyana, 2002). Pemilik akun Instagram yang berbicara tentang politik berlomba-lomba untuk menggunakan *framing* yang berbeda-beda dalam setiap pemberitaannya. Media membuat kebijakan politik menjadi transparan dan menyampaikan peristiwa politik kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami apa yang terjadi di dunia politik.

Robert N. Entman memaparkan analisis *framing* sebagai suatu proses menyeleksi berbagai unsur realitas, sehingga menjadikan bagian tertentu dari sebuah peristiwa menjadi menonjol dibandingkan bagian lainnya. Selain itu informasi dikemas dalam konteks tertentu agar sisi lain dari suatu peristiwa memperoleh perhatian yang besar. Entman juga menjelaskan bahwa terdapat dua dimensi utama dalam proses produksi berita, yaitu seleksi isu dan penonjolan pada aspek-aspek tertentu dari realitas (Mulyana, 2002).

Kajian mengenai analisis *framing* media telah banyak dilakukan dengan fokus objek yang beragam. Salah satu penelitiannya adalah penelitian yang mengkaji *Framing* Pemberitaan pada Kasus Afif Maulana pada Akun Instagram @narasinewsroom menggunakan model Entman. Kajiannya menemukan strategi empati terhadap korban melalui visual dan teks yang mendefinisikan kekerasan polisi sebagai masalah sistematis (Annisa, 2025). Penelitian lain Menganalisis *Framing* Isu Penundaan Pemilu 2024 pada Media Daring CNN Indonesia.com dan Kompas.com dengan menggunakan model Entman. Kajiannya menemukan CNN menyoroti Luhut sebagai tokoh sentral bertanggungjawab atas klaim Big Data, sementara Kompas membingkai isu sebagai tanggungjawab pemerintah secara umum (Alvin, 2022).

Sementara itu, Analisis *Framing* Pemberitaan Kompas.com Mengenai COVID-19 di DKI Jakarta menggunakan model Pan dan Kosicki. Kajiannya menemukan dukungan kuat terhadap kebijakan karantina Gubernur Anies Baswedan meskipun pemberitaan tersebut dinilai kurang disertai verifikasi data yang akurat (Simatupang, 2021). Penelitian lain yang Mengkaji mengenai Media Massa dan Kontruksi Realitas (Analisis *Framing* Terhadap Pemberitaan UU IKN pada Media

Online Tempo.co dan mediaindonesia.com) menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian tersebut menemukan bahwa perbedaan kebijakan redaksi mempengaruhi cara media mengkonstruksi realitas yang sama, di mana Mediaindonesia.com cenderung membingkai pengesahan UU IKN sebagai kebijakan yang progresif dan perlu didukung, sementara Tempo.co lebih menonjolkan kritik, polemik, serta kelemahan regulasi yang dinilai masih perlu diperbaiki. Hasil kajian ini menegaskan bahwa media massa tidak bersifat netral, melainkan memiliki kepentingan dan sudut pandang tertentu dalam membingkai isu politik (Permadi, Muyassaroh, et al., 2024). Penelitian terkait *framing* isu politik telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar pada penelitiannya hanya berfokus pada media digital berbasis portal berita. Kajian mengenai *framing* pada media sosial khususnya Instagram masih jarang dilakukan, terutama yang secara khusus menyoroti isu-isu politik pemerintah dengan analisis menggunakan visual dan

teks singkat sebagai media penyampaian pesan. Isu-isu seperti kebijakan pemerintah, hukum, hak-hak asasi manusia, dan hubungan politik pemerintah dan masyarakat sipil menjadi perbincangan yang sangat diperhatikan di kalangan publik. Pengguna media sosial yang terlibat dalam isu-isu politik tidak semata-mata bertujuan menghidupkan partisipasi politik, melainkan lebih berorientasi pada keterlibatan dalam proses demokrasi (Zempi et al., 2023). Oleh karena itu, terdapat celah penelitian untuk mengkaji bagaimana media sosial, khususnya Instagram, membingkain isu-isu politik melalui kombinasi visual dan teks singkat.

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan dalam periode 2 bulan unggahan berita mengenai isu-isu politik di akun Instagram @narasinewsroom. Bulan Agustus @narasinewsroom menggunggah 17 berita dan pada bulan September @narasinewsroom menggunggah 26 berita mengenai isu politik di Indonesia. Berikut berita yang diterbitkan oleh akun Instagram @narasinewsroom:

Tabel 1. Unggahan Berita @narasinewsroom Bulan Agustus 2025

No	Judul Berita	Tanggal Unggahan
1.	Ombudsman Masih Telaah Laporan, Tom Lambong Minta Publik Tak Rundung Auditor BPKP	13 Agustus 2025
2.	Vonis Ringan Prajurit TNI Pembunuh Pelajar di Medan	14 Agustus 2025
3.	Hasto Gugat Pasal 21 UU Tipikor ke MK, Minta Pidana Perintangannya Maksimal 3 Tahun	14 Agustus 2025
4.	UU Polri Digugat ke MK, Minta Batas Rekrutmen Polisi Minimal S1	15 Agustus 2025
5.	Ketua DPR Singgung Indonesia Gelap-Bendera One Piece di Depan Presiden: Bentuk Kritik Kreatif	15 Agustus 2025
6.	Presiden Prabowo Masih Terapkan Efisiensi, APBN 2026 Diajukan Rp3,786,5 Triliun	15 Agustus 2025

No	Judul Berita	Tanggal Unggahan
7.	Tunjangan Anggota DPR Melambung Tinggi, Gaji Guru & Dosen Bikin Gigit Jari	19 Agustus 2025
8.	Rincian Gaji DPR Dari Ketua Sampai Anggota Hingga Pensiun	20 Agustus 2025
9.	Pesan DPR ke Calon Hakim MK: Bapak Dipilih dari DPR, Jangan Balik Menghantam DPR	21 Agustus 2025
10.	Catat, Ini yang Harus Kamu Tahu dari Peristiwa Polisi Lindas Ojol Semalam	29 Agustus 2025
11.	Ahmad Syahroni Dirotasi, Tidak Lagi Wakil Ketua Komisi III DPR RI	29 Agustus 2025
12.	Divropam Polri Periksa 7 Pelaku yang Melindas Affan Kurniawan	29 Agustus 2025
13.	Mahasiswa Demo di Polda Metro Jaya Tuntut Keadilan untuk Affan Kurniawan	29 Agustus 2025
14.	Dari Rumah Syahroni Menjalar ke Sri Mulyani. Penjarahan Beruntun Massa Tak Dikenal	31 Agustus 2025
15.	Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR NasDem	31 Agustus 2025
16.	DPP PAN Menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai Anggota DPR RI	31 Agustus 2025
17.	Semua Fraksi Sepakat Tunjangan DPR Dievaluasi	31 Agustus 2025

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Instagram @narasinewsroom 2025

Tabel 2. Unggahan Berita @narasinewsroom Bulan September 2025

No	Judul Berita	Tanggal Unggahan
1.	Wakil Panglima TNI: Isu Darurat Militer Sangat Salah	1 September 2025
2.	Sikap Presiden Prabowo Sepanjang Demonstrasi 25 Agustus – 1 September 2025	2 September 2025
3.	Anggota DPR Nonaktif Masih Terima Tunjangan, Ketua BURT: Saya Bidang Internal DPR, Bukan Partai	2 September 2025
4.	Benarkah Polisi Tak Menembakkan Gas Air Mata ke Kampus Unisba & Unpas?	3 September 2025
5.	Lebih Dari 3.000 Orang Ditangkap Polisi Dalam Demo Sepekan	4 September 2025
6.	Cek 17 Tuntutan Rakyat, Melihat PR Presiden, Wakil Rakyat, Polisi Sampai Partai Politik	5 September 2025
7.	Tuntutan 17+8 Dijawab Dengan 6 Poin & Gaji Baru DPR	6 September 2025
8.	3 Orang Masih Hilang Usai Demo Agustus	11 September 2025
9.	Dugaan Korupsi Iklan BJB Menyeret Ridwan Kamil. Apa yang Ditelusuri KPK dalam Kasus Ini?	12 September 2025
10.	Menkeu Bakal Guyur Rp200 Triliun ke 6 Bank Umum Ini Catatan Kritis Ekonomi	12 September 2025
11.	KPU Rahasiakan Ijasah hingga NPWP Capres – Cawapres Karena Bukan Konsumsi Publik	16 September 2025
12.	KPU Cabut Aturan Ijasah Capres – Cawapres Bukan Lagi Rahasia	16 September 2025
13.	MK Tolak Gugatan Uji Materi UU TNI	17 September 2025
14.	MK Tolak Gugatan Syarat Rekrutmen Polisi Minimal Lulusan S1	18 September 2025
15.	Ahmad Dofiri Dari Pecat Sambo Ke Reformasi Polri	18 September 2025
16.	Presiden Prabowo Teken Perpres 79/2025, Gaji ASN – Pejabat Negara Bakal Naik	19 September 2025
17.	Protes atas Penangkapan, 16 Aktivis Demo yang Ditahan Polda Metro Jaya Mogok Makan	19 September 2025
18.	Mentri ESDM: SPBU Swasta Setuju Beli BBM dari Pertamina, Ada 3 Syarat	20 September 2025
19.	Presiden Prabowo Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik Mulai 2026	20 September 2025
20.	Jelang Sidang PBB, Menlu Sugiono Dorong Deklarasi Perlindungan Pekerja Kemanusiaan	22 September 2025
21.	Prabowo Setelah Presiden RI 10 Tahun Absen Pidato Langsung di Panggung PBB	22 September 2025

No	Judul Berita	Tanggal Unggahan
22.	DPR Sahkan APBN 2026: Belanja Negara Tembus Rp3.842 Triliun, Defisit Rp689 Triliun	23 September 2025
23.	Mabes Polri Tetapkan 959 Tersangka Demo 25-31 Agustus 295 Masih Anak-anak	25 September 2025
24.	959 Orang Jadi Tersangka Demo Agustus: Polisi Diduga Lakukan Berbagai Pelanggaran Saat Penangkapan	26 September 2025
25.	Duduk Perkara Pencabutan IDE Pers Istana Jurnalis CNN Indonesia, Kini Kartunya Sudah Dikembalikan	29 September 2025
26.	MK Putuskan Tapera Tak Lagi Wajib untuk Pekerja	30 September 2025

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Instagram @narasinewsroom 2025

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis *framing* Robert N. Entman (Entman, 1993) untuk menelusuri cara akun Instagram @narasinewsroom membentuk *framing* makna dalam penyajian isu politik di Indonesia. Kajian ini membagikan sudut pandang baru dalam riset *framing* politik dengan fokus pada unggahan konten pada bulan Agustus-September 2025. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola pembingkai yang digunakan oleh @narasinewsroom dalam menyajikan isu-isu politik di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis *framing* guna mengkaji bagaimana akun @narasinewsroom membingkai isu politik di Indonesia (Sugiyono, 2013). Metode penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang baik dan yang bersifat alamiah maupun rekayasa yang dilakukan oleh manusia dengan lebih

memperhatikan aspek karakteristik, keterkaitan antarkegiatan dan kualitas (Safarudin et al., 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengarsipkan konten visual (gambar/video), dan narasi (*caption*) terhadap unggahan yang diterbitkan. Objek penelitian terdiri dari 43 unggahan Instagram yang membahas mengenai politik di Indonesia. Dari jumlah tersebut, peneliti memilih 10 unggahan sebagai sampel utama. Unggahan yang dipilih seperti isu kebijakan pemerintah, hukum, hak-hak asasi manusia, dan hubungan politik pemerintah dan masyarakat sipil yang menjadi isu politik dominan berulang. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan unggahan selama bulan Agustus - September 2025. *Purposive Sampling* merupakan metode penentuan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan atau kriteria yang ditetapkan oleh peneliti (Siyoto & Sodik, 2015). Model analisis *framing* yang digunakan adalah Robert N. Entman.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis pemberitaan yang diunggah oleh Instagram @naarasinewsroom. Pada saat penelitian berlangsung, jumlah berita yang digunakan sebanyak 5 berita pada bulan Agustus 2025 dan 5 berita pada bulan September 2025. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana Instagram @narasinewsroom menyajikan dan mempresentasikan isu-isu politik pemerintah dalam media digital.

1. Analisis berita @narasinewsroom 15 Agustus 2025 berjudul “UU Polri Digugat ke MK, Minta Batas Rekrutmen Polisi Minimal S1”

- a. Pendefinisian masalah (*Define Problems*) Dalam pemberitaan akun Instagram @narasinewsroom memaknai peristiwa tersebut sebagai peristiwa ketidaksesuaian antara syarat pendidikan bagi rekrutmen anggota Kepolisian. Masalah terdefiniskan dalam gugatan yang diterima MK dalam pasal 21 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan oaling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum tidak lagi relvan bagi tugas Polri.
- b. Mendiagnosis Penyebab (*Diagnose Causes*) Akun @narasinewsroom mengarahkan penyebab masalah pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf d

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai syarat pendidikan minimal bagi calon anggota Polri. Ketentuan tersebut dibingkai sebagai faktor yang dinilai dapat menurunkan kredibilitas Polri sebagai institusi.

- c. Penilaian moral (*Make Moral Judgment*) Melalui pemberitaannya @narasinewsroom memberikan penilaian moral bahwa syarat minimal pendidikan bagi Polri dinilai terlalu longgar dan tidak sebanding dengan kompleksitas tantangan masa kini. Media mengaitkan kondisi tersebut dengan standar pendidikan yang rendah bagi Polisi dapat menghambat penyidikan dan beresiko juga terhadap penurunan kredibilitas kinerja Polri bahkan bisa saja berpotensi melanggar hak asasi manusia.
- d. Rekomendasi Penanganan (*Treatment Recommendation*) *Framing* pemberitaan @narasinewsroom memberikan rekomendasi penanganan yang mengarahkan kepada permintaan terhadap MK mengenai gugatan Pasal 21 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan tafsir ulang. Media membingkai solusi berupa penafsiran ulang syarat menjadi anggota

Kepolisian Republik Indonesia supaya tidak bertentangan dengan UUD.

Berdasarkan keempat elemen *framing* dalam (Entman, 1993), disimpulkan bahwa @narasinewsroom membingkai isu mengenai gugatan UU Polri sebagai persoalan yang struktural dalam kepolisian. Media cenderung mengambil posisi berpihak pada kepentingan publik dengan mengkritisi kebijakan yang dianggap berpengaruh terhadap kredibilitas aparat serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui *framing* ini, @narasinewsroom berperan sebagai media pengawas kekuasaan (Zamroni, 2022) yang mengarah pada profesionalisme aparat.

2. Analisis berita @narasinewsroom 14 Agustus 2025 berjudul “Hasto Gugat Pasal 21 UU Tipikor ke MK, Minta Pidana Perintangannya Penyidikan Maksimal 3 Tahun”

a. Pendefinisian Masalah (*Define Problems*) Dalam pemberitaan akun Instagram @narasinewsroom memaknai peristiwa sekretaris jenderal PDIP yang menggugat Pasal 21 UU Tipikor, perkaranya terdaftar dengan Nomor 136/PUU-XXIII/2025. Masalah terdefiniskan sebagai gugatan terhadap Pasal 21 yang tidak proposional dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan prinsip negara.

b. Mendiagnosis Penyebab (*Diagnose Causes*) Akun @narasinewsroom mengarahkan penyebab masalah pada pasal 21 yang mestinya tidak ditafsirkan sesuai kebutuhan aparat hukum, pembatasan dalam pasal ini dinilai harus sesuai dengan bunyi dan makna teksnya. Penafsiran pasal ini seharusnya tidak digunakan untuk menetapkan tersangka atau mendakwa seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi.

c. Penilaian moral (*Make Moral Judgment*) Melalui pemberitaannya @narasinewsroom memberikan penilaian moral bahwa penerapan Pasal 21 UU Tipikor tidak proposional dan melanggar prinsip keadilan hukum. Penafsiran pasal yang dianggap menyesuaikan kebutuhan aparat hukum ditingkai menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum yang sebagaimana diatur dalam konstitusi.

d. Rekomendasi Penanganan (*Treatment Recommendation*) *Framing* pemberitaan @narasinewsroom memberikan rekomendasi penanganan yang mengarahkan pada perlunya penafsiran ulang oleh MK mengenai Pasal 21 UU Tipikor. Media membingkai langkah tersebut diberikan untuk mencegah

ketidakpastian hukum serta memastikan tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Berdasarkan keempat elemen *framing* dalam (Entman, 1993), disimpulkan bahwa @narasinewsroom membingkai isu gugatan Pasal 21 UU Tipikor sebagai persoalan ketidakproporsionalan norma hukum dalam proses penegakan hukum. Media cenderung mengambil posisi pada prinsip kepastian dan keadilan hukum yang mengkritisi penafsiran ulang pasal oleh penegak hukum. Melalui *framing* ini, @narasinewsroom memosisikan diri sebagai media pengawas kekuasaan (Zamroni, 2022) yang menekankan pentingnya penegakan hukum proporsional.

3. Analisis berita @narasinewsroom 19 Agustus 2025 berjudul “Tunjangan Anggota DPR Melambung Tinggi, Gaji Guru & Dosen Bikin Gigit Jari”

a. Pendefinisian masalah (*Define Problems*) Dalam pemberitaan akun Instagram @narasinewsroom memaknai peristiwa ini sebagai ketimpangan kebijakan kesejahteraan antara elite politik dengan tenaga pendidik. Masalah terdefiniskan sebagai terjadinya ketimpangan

terhadap besarnya fasilitas antara anggota DPR dan tenaga pendidik.

- b. Mendiagnosis Penyebab (*Diagnose Causes*) Akun @narasinewsroom mengarahkan penyebab masalah pada kebijakan DPR yang menetapkan pemberian tunjangan rumah sebagai pengganti fasilitas rumah dinas berdampak pada meningkatnya pendapatan anggota DPR. Pemberian tunjangan tinggi bagi anggota DPR menyebabkan ketimpangan kesejahteraan bagi tenaga pendidik.
- c. Penilaian moral (*Make Moral Judgment*) Melalui pemberitaannya @narasinewsroom memberikan penilaian moral bahwa fasilitas elit yang didapat anggota DPR dianggap tidak adil di tengah kondisi kesejahteraan guru dan dosen. Media mengaitkan dengan kurang berpihaknya negara terhadap kesejahteraan guru dan dosen sebagai tenaga pendidik.
- d. Rekomendasi Penanganan (*Treatment Recommendation*) *Framing* pemberitaan @narasinewsroom memberikan rekomendasi penanganan yang mengarahkan pada revisi kebijakan untuk meningkatkan pendapatan guru dan dosen, serta melakukan transparansi dan pengurangan tunjangan DPR yang

berlebihan. Media membingkai solusi peninjauan ulang yang diberikan agar negara lebih memperhatikan kesejahteraan guru dan dosen sebagai tenaga pendidik secara adil dan berpihak.

Berdasarkan keempat elemen *framing* dalam (Entman, 1993), disimpulkan bahwa @narasinewsroom membingkai isu tunjangan anggota DPR sebagai isu ketimpangan dalam kebijakan kesejahteraan negara. Media cenderung mengambil posisi pada kesejahteraan tenaga pendidik, dan mengkritisi kebijakan negara yang dinilai mementingkan elite politik. Melalui *framing* ini @narasinewsroom memosisikan sebagai media pengawas kekuasaan (Zamroni, 2022) yang mementingkan pentingnya keadilan serta keberpihakan pada sektor pendidikan

4. Analisis berita @narasinewsroom 29 Agustus 2025 berjudul “Catat, Ini yang Harus Kamu Tahu dari Peristiwa Polisi Lindas Ojol Semalam”

a. Pendefinisian Masalah (*Define Problems*) Dalam pemberitaan akun Instagram @narasinewsroom memaknai peristiwa ini tersebut sebagai bentuk kekerasan yang menyebabkan meninggalnya warga sipil dalam aksi demonstrasi, yaitu pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Masalah terdefiniskan

sebagai peristiwa yang melibatkan penggunaan kendaraan taktis aparat yang menimbulkan korban jiwa.

- b. Mendiagnosis Penyebab (*Diagnose Causes*) Akun @narasinewsroom mengarahkan penyebab masalah pada tindakan aparat Brimob yang meninggalkan lokasi setelah korban terkapar. Tidak adanya tanggung jawab dari aparat memicu reaksi warga dan para demonstran menggeruduk Markas Komando Brimob.
- c. Penilaian moral (*Make Moral Judgment*) Melalui pemberitaannya @narasinewsroom memberikan penilaian moral bahwa tindakan yang dilakukan aparat mencerminkan rendahnya tingkat profesionalisme dan kurangnya tanggung jawab dalam melindungi sipil. Media mengaitkan dengan reaksi publik yang menunjukkan bahwa tindakan aparat bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan.
- d. Rekomendasi Penanganan (*Treatment Recommendation*) *Framing* pemberitaan @narasinewsroom memberikan rekomendasi penanganan yang mengarahkan pada pertanggungjawaban dengan proses penahanan dan pemeriksaan tujuh anggota polisi oleh Divisi Propam Polri.

Berdasarkan keempat elemen *framing* dalam (Entman, 1993), disimpulkan bahwa @narasinewsroom membingkai isu polisi linds pengemudi ojol sebagai persoalan terkait bentuk penyalahgunaan kewenangan aparat. Media cenderung mengambil posisi pada kepentingan publik daan perlindungan terhadap warga sipil, dengan mengkritisi terhadap Tindakan aparat yang tidak profesional. Melalui *framing* ini, @narasinewsroom memosisikan sebagai media pengawas kekuasaan (Zamroni, 2022) yang menuntut tanggungjawab institusi.

5. Analisis berita @narasinewsroom 31 Agustus 2025 berjudul “DPP PAN Menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai Anggota DPR RI”

- a. Pendefinisian Masalah (*Define Problems*) Dalam pemberitaan akun Instagram @narasinewsroom memaknai peristiwa penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai respons partai politik pada desakan dari publik. Masalah terdefiniskan sebagai perilaku anggota DPR yang memicu kontroversi dan mencoreng citra lembaga legislatif.
- b. Mendiagnosis Penyebab (*Diagnose Causes*) Akun @narasinewsroom mengarahkan penyebab masalah pada tindakan Eko Patrio dan Uya Kuya

memicu reaksi keras publik karena dianggap tidak peka terhadap polemik terkait tunjangan anggota DPR. Media menyoroti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mendesak partai politik untuk bertindak tegas terhadap anggota legislasi yang menimbulkan kontroversi.

- c. Penilaian moral (*Make Moral Judgment*) Melalui pemberitaannya @narasinewsroom memberikan penilaian moral bahwa perilaku anggota DPR yang memicu reaksi publik mencerminkan lemahnya etika sebagai wakil rakyat. Tindakan tersebut dianggap tidak layak dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap DPR.
- d. Rekomendasi Penanganan (*Treatment Recommendation*) *Framing* pemberitaan @narasinewsroom memberikan rekomendasi penanganan yang mengarahkan pada partai politik unruk mengambil langkah tegas terhadap anggota legislatif yang melanggar norma etika. Penonaktifan yang dilakukan kepada Eko Patrio dan Uya Kuya ditampilkan sebagai pertanggungjawaban dan upaya untuk meredakan dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan keempat elemen *framing* dalam (Entman, 1993),

disimpulkan bahwa @narasnewsroom membingkai isu penonaktifan anggota DPR sebagai persoalan etika dalam politik. Media cenderung mengambil posisi pada kepentingan publik dan nilai-nilai etika politik, dengan mengkritisi perilaku anggota DPR yang dinilai tidak pantas. Melalui *framing* ini, @narasnewsroom memosisikan diri sebagai media pengawas kekuasaan (Zamroni, 2022) yang menuntut integritas lembaga legislatif

6. Analisis berita @narasnewsroom 4 September 2025 berjudul “Lebih Dari 3.000 Orang Ditangkap Polisi Dalam Demo Sepekan”

- a. Pendefinisian Masalah (*Define Problems*) Dalam pemberitaan akun Instagram @narasnewsroom memaknai peristiwa demonstrasi sebagai bentuk krisis demokrasi dan pelanggaran hak sipil. Masalah terdefiniskan sebagai tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil, peristiwa tersebut tidak disebut sebagai aksi anarkis melainkan sebagai kekerasan dalam merespons aksi protes warga.
- b. Mendiagnosis Penyebab (*Diagnose Causes*) Akun @narasnewsroom mengarahkan penyebab masalah pada tindakan aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi dilakukan secara sewenang-wenang terhadap warga sekitar. Pembatasan

arus informasi yang dilakukan dinilai sebagai bagian dari upaya pembungkaman.

- c. Penilaian moral (*Make Moral Judgment*) Melalui pemberitaannya @narasnewsroom memberikan penilaian moral bahwa aparat negara sebagai aktor yang bertindak represif dan berlebihan telah melampaui batas kewenangan penegakan hukum, masyarakat sipil menjadi korban kekerasan struktural.
- d. Rekomendasi Penanganan (*Treatment Recommendation*) *Framing* pemberitaan @narasnewsroom memberikan rekomendasi penanganan yang secara tersirat mendorong adanya evaluasi pertanggungjawaban dan akuntabilitas aparat, penghentian tindak kekerasan terhadap massa aksi, serta pemulihan hak sipil.

Berdasarkan keempat elemen *framing* dalam (Entman, 1993), disimpulkan bahwa @narasnewsroom membingkai isu peristiwa penangkapan massa demonstrasi sebagai persoalan krisis demokrasi dan pelanggaran pada hak sipil. Media cenderung mengambil posisi pada kepentingan masyarakat dengan mengkritisi Tindakan represif aparat negara yang melampaui batas. Melalui *framing* ini, @narasnewsroom memosisikan sebagai media pengawas kekuasaan (Zamroni,

2022) yang menuntut pertanggungjawaban aparat serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

7. Analisis berita @narasinewsroom 12 September 2025 berjudul “Dugaan Korupsi Iklan BJB Menyeret Ridwan Kamil, Apa yang Ditelusuri KPK dalam Kasus Ini”

- a. Pendefinisian Masalah (*Define Problems*) Dalam pemberitaan akun Instagram @narasinewsroom memaknai peristiwa ini sebagai dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek iklan Bank BJB yang tidak hanya berdampak pada negara, tetapi juga melibatkan nama Ridwan Kamil sebagai mantan Gubernur Jawa Barat. Masalah terdefiniskan sebagai dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi.
- b. Mendiagnosis Penyebab (*Diagnose Causes*) Akun @narasinewsroom mengarahkan penyebab masalah pada adanya selisih anggaran iklan Bank BJB sebesar Rp222 miliar yang digunakan sebagai dana non-budgeter. Media menekankan bahwa dana tersebut mengalir ke sejumlah pihak, termasuk Ridwan Kamil.
- c. Penilaian moral (*Make Moral Judgment*) Melalui pemberitaannya @narasinewsroom memberikan

penilaian moral bahwa dugaan penyalahgunaan dana oleh elite politik bertentangan dengan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. KPK ditampilkan sebagai institusi yang menjalankan tugas sebagai penegak hukum melalui penyitaan aset dan pemeriksaan sejumlah pihak.

- d. Rekomendasi Penanganan (*Treatment Recommendation*) *Framing* pemberitaan @narasinewsroom memberikan rekomendasi penanganan yang menekankan pada KPK untuk terus menelusuri aliran dana hingga ke aktor politik. Pemeriksaan kepada pihak terkait, serta penyitaan aset sebagai langkah untuk memastikan penegakan hukum yang tegas.

Berdasarkan keempat elemen *framing* dalam (Entman, 1993), disimpulkan bahwa @narasinewsroom membingkai isu dugaan korupsi iklan Bank BJB sebagai persoalan integritas elite politik. Media cenderung mengambil posisi pada prinsip transparansi dengan mengkritisi dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh figur publik. Melalui *framing* ini, @narasinewsroom memosisikan sebagai media pengawas kekuasaan (Zamroni, 2022) yang menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan tanggung jawab pejabat negara.

8. Analisis berita @narasnewsroom 18 September 2025 berjudul “Protes atas Penangkapan, 16 Aktivis Demo yang Ditahan Polda Metro Jaya Mogok Makan”
- Pendefinisian Masalah (*Define Problems*) Dalam pemberitaan akun Instagram @narasnewsroom memaknai peristiwa ini sebagai aksi mogok makan yang dilakukan para aktivis sebagai bentuk protes terhadap penangkapan demonstran pasca aksi Agustus 2025. Masalah terdefiniskan sebagai persoalan hak dan kebebasan berekspresi para aktivis.
 - Mendiagnosis Penyebab (*Diagnose Causes*) Akun @narasnewsroom mengarahkan penyebab masalah pada tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menjadikan para aktivis sebagai tersangka. Aksi penangkapan ini dilakukan karena aktivitas media sosial yang dianggap menyebarkan ajakan kerusuhan.
 - Penilaian moral (*Make Moral Judgment*) Melalui pemberitaannya @narasnewsroom memberikan penilaian moral bahwa penahanan para aktivis merupakan tindakan yang represif dan tidak sebanding dengan hal yang dituduhkan. Aksi yang dilakukan para tahanan sebagai bentuk perlawanan hak dan kebebasan berekspresi.
 - Rekomendasi Penanganan (*Treatment Recommendation*) *Framing* pemberitaan @narasnewsroom memberikan rekomendasi penanganan pada perlunya evaluasi terhadap penahanan aktivis demonstrasi. Memberikan pembebasan tahanan, pemenuhan hak sipil serta penegakan hukum yang adil.
- Berdasarkan keempat elemen *framing* dalam (Entman, 1993), disimpulkan bahwa @narasnewsroom meringkai isu aksi mogok makan para aktivis sebagai persoalan pelanggaran hak-hak sipil. Media cenderung mengambil posisi pada kepentingan masyarakat sipil dengan mengkritisi Tindakan penahanan yang represif. Melalui *framing* ini, @narasnewsroom memosisikan sebagai media pengawas (Zamroni, 2022) yang ikut menuntut keadilan serta perlindungan kebebasan berekspresi masyarakat.
9. Analisis berita 26 September 2025 berjudul “959 Orang Jadi Tersangka Demo Agustus: Polisi Diduga Lakukan Berbagai Pelanggaran Saat Penangkapan”
- Pendefinisian Masalah (*Define Problems*) Dalam pemberitaan akun Instagram @narasnewsroom memaknai peristiwa penetapan 959 orang sebagai tersangka dalam rangkaian demonstrasi Agustus 2025 sebagai persoalan yang serius dalam

- hukum. Masalah terdefiniskan sebagai pelanggaran prosedur hukum dengan menetapkan 959 orang sebagai tersangka dan hak-hak dari sipil yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
- b. Mendiagnosis Penyebab (*Diagnose Causes*) Akun @narasinewsroom mengarahkan penyebab masalah pada tindakan aparat kepolisian yang melakukan penangkapan dan menetapkan sebagai tersangka masuk dalam tindakan tanpa prosedur hukum. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menemukan terkait penetapan tersangka tanpa bukti yang kuat, tidak adanya pemberitahuan pada pihak keluarga, pembatasan akses penasihat hukum, serta penyitaan barang pribadi.
- c. Penilaian moral (*Make Moral Judgment*) Melalui pemberitaannya @narasinewsroom memberikan penilaian moral bahwa tindakan aparat kepolisian mencerminkan pola penegakan hukum yang represif dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Para demonstran menjadi pihak yang dirugikan oleh prosedur hukum yang tidak terbuka dan tidak dipertanggungjawabkan.
- d. Rekomendasi Penanganan (*Treatment Recommendation*) *Framing* pemberitaan @narasinewsroom memberikan rekomendasi penanganan untuk dilakukannya evaluasi terhadap proses penangkapan, penahanan serta penetapan tersangka pada rangkaian demonstrasi Agustus 2025. Tuntutan sesuai prosedur hukum, tidak terbatasnya akses penasihat hukum, pemberitahuan kepada pihak keluarga, serta penghentian terhadap penyitaan tanpa dasar hukum guna menjamin penegakan hukum yang adil dan berlandaskan HAM.
- Berdasarkan keempat elemen *framing* dalam (Entman, 1993), disimpulkan bahwa @narasinewsroom membingkai isu penetapan ratusan tersangka demonstrasi sebagai persoalan pelanggaran hukum dan hak-hak sipil. Media cenderung mengambil posisi pada kepentingan masyarakat dengan mengkritisi penegakan hukum yang dinilai represif dan tidak transparan. Melalui *framing* ini, @narasinewsroom memosisikan sebagai media pengawas kekuasaan (Zamroni, 2022) yang menuntut perlindungan hak asasi manusia serta penegakan hukum yang sesuai.
10. Analisis berita @narasinewsroom 29 September 2025 berjudul “Duduk Perkara Pencabutan IDE Pers Istana Jurnalis CNN Indonesia, Kini Kartunya Sudah Dikembalikan”

- a. Pendefinisian Masalah (*Define Problems*) Dalam pemberitaan akun Instagram @narasinewsroom memaknai peristiwa ini sebagai pencabutan ID pers Istana terhadap jurnalis CNN. Masalah terdefiniskan pada tindakan yang dilakukan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden yang dinilai sebagai langkah pembungkaman kerja jurnalistik.
- b. Mendiagnosis Penyebab (*Diagnose Causes*) Akun @narasinewsroom mengarahkan penyebab masalah pada keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden yang mencabut akses liputan Istana jurnalis setelah memberikan pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap berada diluar konteks acara.
- c. Penilaian moral (*Make Moral Judgment*) Melalui pemberitaannya @narasinewsroom memberikan penilaian bahwa pencabutan ID pers jurnalis CNN merupakan tindakan yang melanggar kebebasan pers. Jurnalis menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalistik, sementara tindakan pencabutan akses liputan dipandang sebagai bentuk pembungkaman.
- d. Rekomendasi Penanganan (*Treatment Recommendation*) *Framing* pemberitaan @narasinewsroom memberikan rekomendasi penanganan pada perlunya klarifikasi terbuka dari pihak Istana Kepresidenan terkait pencabutan akses liputan jurnalis. Pengakuan kesalahan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden untuk menjadi komitmen agar peristiwa serupa tidak terulang.
- Berdasarkan keempat elemen *framing* dalam (Entman, 1993), disimpulkan bahwa @narasinewsroom membingkai isu pencabutan ID pers jurnalis CNN Indonesia sebagai persoalan kebebasan pers dan Langkah pembungkaman kerja jurnalis. Media cenderung mengambil posisi pada kepentingan jurnalis dan prinsip kebebasan pers dengan mengkritisi Tindakan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden yang dinilai sebagai Langkah pembungkaman media. Melalui *Framing* ini, @narasinewsroom memosisikan sebagai media pengawas kekuasaan (Zamroni, 2022) yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers dalam sistem demokrasi.
- Secara keseluruhan, berdasarkan temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menemukan bahwa @narasinewsroom secara aktif membentuk konstruksi makna melalui

retorika keberpihakan kepada korban dan masyarakat sipil serta kritis terhadap institusi negara (Annisa, 2025). Namun terdapat kebaruan untuk penelitian ini yang terletak pada cakupan isunya, melainkan merangkum pola pembingkaiannya berbagai isu politik dan kebijakan publik selama Agustus-September 2025. Hasilnya menegaskan konsep konstruksi realitas media seperti penelitian (Permadi, Muyassaroh, et al., 2024), di mana @narasinewsroom berfungsi sebagai media pengawas kekuasaan (*watchdog*).

Penutup

Penelitian ini mengkaji *framing* pemberitaan mengenai isu politik pada akun Instagram @narasinewsroom selama periode Agustus-September 2025 dengan menggunakan model *framing* Robert N. Entman dengan analisis terhadap 10 berita terpilih yang dengan meliputi empat unsur utama.

Dalam elemen pendefinisian masalah (*Define Problems*), sebagian besar menempatkan peristiwa yang diberitakan sebagai isu politik dan kebijakan publik. Isu yang dibahas mengaitkan pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dalam elemen penyebab masalah (*Diagnose Causes*), berita yang dianalisis cenderung timbul dari permasalahan yang mengarahkan pada kekuasaan negara, penegakan hukum yang

represif, tindak korupsi serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan aparat negara. Faktor kebijakan dan tindakan dari lembaga menjadi fokus yang ditonjolkan dalam pemberitaan. Dalam elemen penilaian moral (*make moral judgement*), pemberitaannya cenderung kritis terhadap praktik kekuasaan yang menyimpang prinsip keadilan dan demokrasi. Sementara itu, pada elemen rekomendasi penanganan (*Treatment Recommendation*), *framing* pemberitaan mendorong adanya transparansi, pertanggungjawaban institusional, dan reformasi kelembagaan.

Secara keseluruhan, dari 10 berita yang dianalisis, isu politik yang konsisten dibahas oleh @narasinewsroom berkaitan dengan isu praktik kekuasaan negara, perilaku elite politik, dan kebijakan publik. Adapun penonjolan isu yang paling dominan dalam pemberitaan terletak pada isu mengenai tindakan represif aparat negara terhadap masyarakat sipil, yang dengan konsisten muncul pada berita terkait penanganan demonstrasi di Agustus-September 2025. Hal ini terlihat dari penggunaan pemilihan diksi yang cenderung memihak korban, penempatan masyarakat sipil sebagai pihak terdampak serta aparat sebagai aktor yang dinilai melampaui batas kewenangan. Pola penonjolan tersebut menunjukkan

kecenderungan @narasinewsroom menempatkan masyarakat sipil sebagai titik rujukan utama dalam konstruksi pemberitaannya. Dengan demikian, orientasi oleh @narasinewsroom yang tampak pro-masyarakat dan kritis terhadap pemerintah tidak semata-mata menunjukkan keberpihakan, melainkan hasil dari proses penjonjolan aspek tertentu dalam *framing*, sekaligus menegaskan peran media sebagai kontrol sosial.

Temuan ini menegaskan bahwa media sosial, khususnya Instagram berperan sebagai arena produksi makna politik yang membentuk persepsi publik terhadap kekuasaan demokrasi digital Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alvin, S. (2022). Analisis Framing Isu Penundaan Pemilu 2024 di CNN Indonesia. com dan Kompas. com. *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 16(2), 133–148.
- Annisa, P. I. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Afif Maulana di Instagram Narasinewsroom. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 239–253.
- Aziza, N. (2022). Analisis Konten Narasi oleh Najwa Shihab. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*.
- Buchory, C. V., & Sukmawati, D. (2022). Berita Dalam Logika Instagram (Analisis Logika Media Sosial Akun Instagram Media Berita Alternatif). *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan*, 4(2), 23–39.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Towards clarification of a fractured paradigm. *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*, 390, 397.
- Fujiawati, F. S., & Raharja, R. M. (2021). Pemanfaatan media sosial (instagram) sebagai media penyajian kreasi seni dalam pembelajaran. *JPKS (Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni)*, 6(1).
- Heryanto, G. G. (2018). *Media komunikasi politik*. IRCiSoD.
- Mulyana, D. R. D. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Lkis Pelangi Aksara.
- Noventa, C., Soraya, I., & Muntazah, A. (2023). Pemanfaatan media sosial Instagram buddyku sebagai sarana informasi terkini. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 3(3), 626–635.
- Peranginangin, I. F. D., Lubis, P. R., & Batubara, M. Q. (2025). Dinamika Media Massa dan Perubahan Sosial di Indonesia. *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 9(2), 58–69.
- Permadi, D., Muyassaroh, I. S., Purnaweni, H., & Widodo, A. S. (2024). Media Massa dan Konstruksi Realitas (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan UU IKN pada Media Online Tempo. co dan mediaindonesia. com). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1), 1–17.
- Permadi, D., Suparto, D., & Bisri, A. Z. (2024). Analisis semiotik iklan politik Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. *Jurnal Komunikatio*, 10(1), 45–55.
- Pureklolon, T. T. (2020). *Perilaku Politik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian

- kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Salsabila, D., Yudhapramesti, P., & Bakry, G. N. (2023). Motif khalayak dalam mengakses konten berita di Instagram Reels@ narasnewsroom. *Jurnal Komunikasi Global*, 12(1), 168–189.
- Simatupang, R. (2021). Analisis framing pemberitaan Kompas.com tentang covid-19 di DKI Jakarta. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 39–52.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Survei Internet APJII 2025. (2025). *Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2025*. <https://survei.apjii.or.id/survei>
- Yohana, F. M., & Valentina, E. (n.d.). Analisis Wacana pada Media Massa Online Menurut Semiotika Roland Barthes dalam Berita di Instagram narasnewsroom. *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS)*, 493–501.
- Yusyama, A. Y., & Khoirunnisa, R. (2021). Analisis Wacana Kritis Pada Media Massa Daring (Online) Bantennews.co.id Kolom Hukum Edisi Februari 2021. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 11(1), 15–24.
- Zamroni, M. (2022). *Relasi kuasa media politik: Kontestasi politik dalam redaksi berita televisi*. Prenada Media.
- Zempi, C. N., Kuswanti, A., & Maryam, S. (2023). Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Pengetahuan Politik Masyarakat. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 116–123.